

. BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem akuntansi pemerintah daerah merupakan bidang ilmu akuntansi yang saat ini sedang berkembang sangat pesat. Dalam sistem akuntansi pemerintahan ditetapkan entitas pelaporan dan entitas akuntansi yang menyelenggarakan sistem akuntansi pemerintah daerah. Tujuan utama adanya perubahan perubahan kebijakan pada sistem akuntansi keuangan daerah untuk mewujudkan tata kelola yang baik dan bersih, berorientasi pada hasil, profesionalitas, dan menghasilkan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel serta dapat diandalkan.

Berdasarkan PP No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan adalah amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara . Maka dalam hal ini setiap entitas pelaporan dan entitas akuntansi menyelenggarakan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah yang meliputi serangkaian prosedur mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengiktisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan anggaran pendapatan dan biaya daerah serta pemerintah adalah entitas pelapor (*reporting entity*) yang harus membuat laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawabannya karena pemerintah menguasai dan mengendalikan sumber – sumber yang signifikan, penggunaan sumber - sumber tersebut oleh pemerintah dapat berdampak luas bagi kesejahteraan dan ekonomi rakyat, dan terdapat pemisahan antara manajemen dan pemilik sumber - sumber tersebut.

Sistem akuntansi keuangan daerah harus memenuhi laporan keuangan pemerintah dengan prinsip prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti SAK sesuai dengan peraturan pemerintah no.71 tahun 2015, laporan keuangan kemudian disampaikan kepada DPRD/ DPD dan masyarakat umum setelah di audit oleh badan pemeriksa keuangan (BPK). Sistem akuntansi keuangan daerah merupakan serangkaian prosedur yang saling berhubungan yang disusun sesuai dengan satuan skema yang menyeluruh yang ditunjuk untuk menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang akan digunakan oleh pihak intern dan pihak ekstern pemerintah daerah dalam mengambil keputusan (Abdul Halim, 2017).

Masalah sistem akuntansi keuangan daerah dan keandalan laporan keuangan di indonesia merupakan suatu hal yang menarik untuk dikaji lebih dalam dan lebih lanjut, karena pada kenyataannya laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah masih banyak disajikan data -data yang tidak sesuai, selain itu masih banyak penyimpangan yang berhasil ditemukan oleh (BPK) dalam pelaksanaan audit laporan keuangan. Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang handal dan dapat dipercaya, maka pemerintahan harus memiliki sistem akuntansi yang handal pula. sistem akuntansi yang lemah dapat menyebabkan pengendalian internal lemah dan pada akhirnya laporan keuangan yang dihasilkan juga kurang handal dalam mengambil sebuah keputusan. Informasi akuntansi keuangan pemerintah daerah disajikan selengkap mungkin mencakup semua informasi yang dappat mempengaruhi pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada. Adapun keandalan merupakan

kemampuan informasi untuk memberikan keyakinan bahwa informasi tersebut benar atau valid. Dalam hal ini memungkinkan ketersediaan data secara aproksimasi tanpa mempengaruhi realibilitas secara material dengan begitu akan meningkatkan manfaat secara keseluruhan. Keandalan informasi dalam laporan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material dan menghasilkan informasi laporan keuangan yang harus dibuat sedemikian rupa sehingga laporan keuangan yang dihasilkan mempunyai kemampuan dalam informasi bahwa informasi tersebut benar atau valid (Trisnani, 2018).

Fenomena yang sering terjadi dalam menyusun laporan keuangan yaitu masih kurangnya penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dalam menyusun laporan keuangan sehingga laporan keuangan yang dihasilkan tidak dapat diandalkan dikarenakan pemerintah dalam menyusun laporan keuangan daerah kurang memperhatikan penggunaan SAP pada laporan keuangan daerah sehingga laporan keuangan tidak optimal dan maksimal dalam pengelolaan aset daerah untuk melihat perkembangan dari tahun yang lalu dengan tahun yang sekarang.

Berdasarkan latar belakang masalah dengan kajian empiris atau fakta bahwa penelitian ini merupakan lanjutan yang dilakukan oleh penelitian terdahulu, alasan penulis mendasari kebenaran penelitian ini dikarenakan pada penelitian terdahulu masih kurang yang mengamati dan meneliti antara sistem akuntansi keuangan daerah dengan keandalan laporan keuangan khususnya di BPKD Kabupten Luwu serta pada instansi ini terdapat perangkat yang mengabungkan laporan keuangan satuan kerja daerah sehingga menghasilkan laporan keuangan pemerintahan.

Hal ini yang mendorong peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Keandalan Laporan Keuangan (Studi Kasus pada BPKD Kabupaten Luwu)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah terhadap keandalan laporan keuangan pada BPKD Kabupaten Luwu ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari perumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah terhadap keandalan laporan keuangan pada BPKD Kabupaten Luwu.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari dilaksakanya penelitian ini ada beberapa manfaat yang dapat diambil oleh beberapa pihak yaitu :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Dari penelitian yang dilakukan diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah terhadap keandalan laporan keuangan pada BPKD Kabupaten Luwu, serta sebagai bahan perbandingan antara teori nyata sebagai referensi untuk penelitian lebih lanjut.

1.4.2 Manfaat Praktis

1.4.2.1 Bagi Penyusun

Setelah melakukan penelitian diharapkan dapat menambah pengetahuan dan menjawab masalah masalah yang telah diidentifikasi pada bagian bagian sebelumnya.

1.4.2.2 Bagi Akademisis

Peneliti diharapkan lebih menambah referensi untuk penelitian selanjutnya dibidang pemerintahan.

1.4.2.3 Bagi Instansi Pemerintah

Hasil penelitian ini di harapkan dapat membrikan solusi bagi pemerintah untuk menerapkan sistem akuntansi keuangan dalam menyusun laporan keuangan daerah yang lebih valid dan akurat serta dapat diandalkan.

1.5 Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini yaitu sistem akuntansi keuangan daerah merupakan suatu sistem yang dari beberapa indikator antara lain kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintantahan, pencatatatan akuntansi berdasarkan pencatatan yang berlaku umum dan pembuatan laporan keuanga secara prodik. Sedangkan keandalan laporan keuangan merupakan kemampuan informasi laporan keuangan yang terdiri dari beberapa indikator antara lain penyajian fakta secara jujur, dapat di uji, netralisasi. Pembatasan masalah dilakukan agar penelitian terfokus pada pokok permasalahan yang ada serta pembahasannya, sehingga peneliti tidak akan menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu peneliti membatasi penelitian ini pada variabel bebas yaitu sistem

akuntansi keuangan daerah sementara variabel terikat adalah keandalan laporan keuangan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Agensi (*Agency Theory*)

Theori Agency dapat dimaknai dengan adanya kewajiban pihak pemegang amanah (*agen*) untuk memberikan pertanggung jawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban antara pihak prinsipal dengan agen dimana prinsipal memberikan kekuasaan pada agen untuk membuat keputusan, kewenangan untuk membuat diskresi keputusan tersebut bersifat terutang dari prinsipal (Abdul Hakim, 2017).

Teori keagenan dilakukan untuk menjawab masalah keagenan yang terjadi jika pihak-pihak yang saling bekerja sama memiliki tujuan dan pembagian kerja yang berbeda. Berkaitan dengan keandalan laporan keuangan daerah merupakan suatu konsep yang didasari oleh teori keagenan, dalam pelaporan keuangan pemerintah yang bertindak sebagai agen mempunyai kewajiban menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna informasi keuangan pemerintah yang bertindak sebagai prinsipal dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik. Dalam suatu pemerintahan demokrasi, hubungan antara pemerintah dan para pengguna informasi keuangan pemerintah dapat digambarkan sebagai suatu hubungan keagenan (*agency relationship*). Dalam hal ini pemerintah berfungsi sebagai agen yang diberi kewenangan untuk melaksanakan kewajiban tertentu yang ditentukan

oleh para pengguna informasi keuangan pemerintah sebagai prinsipal, baik secara langsung atau tidak langsung melalui wakil-wakilnya. Dalam hubungan keagenan, pemerintah sebagai agen harus melaksanakan apa yang menjadi kepentingan para pengguna informasi keuangan pemerintah sebagai prinsipalnya.

2.2 Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Teori kepatuhan dapat mendorong seseorang untuk lebih mematuhi peraturan yang berlaku dan cenderung dimaknai sebagai kepatuhan perilaku individu yang mematuhi hukum yang mereka anggap sesuai dan konsisten dengan norma-norma internal mereka serta berusaha untuk menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu karena selain merupakan suatu kewajiban menyampaikan laporan keuangan tepat waktu, juga akan sangat bermanfaat bagi para pengguna laporan keuangan (Herliana, 2016).

Tuntutan akan keandalan laporan keuangan dalam penyampaian laporan keuangan tidak lepas dari peraturan pemerintah yang telah di atur dalam PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. standar tersebut secara hukum mengisyaratkan adanya kepatuhan setiap perilaku individu maupun sektor publik yang terlibat di pemerintah daerah kiranya harus mematuhi dan membuat laporan keuangan sesuai dengan SAP. Hal tersebut sesuai dengan teori kepatuhan (*compliance theory*).

Dapat disimpulkan bahwa teori kepatuhan dapat menggerakkan seseorang agar dapat lebih mematuhi peraturan yang berlaku serta berusaha untuk menyampaikan laporan keuangan secara andal, juga akan sangat bermanfaat bagi para pengguna laporan keuangan.

2.3 Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Sistem akuntansi keuangan daerah dapat didefinisikan sebagai kumpulan dari subsistem-subsistem yang didalam setiap subsistem tersebut terdapat tahap-tahap, prosedur, perangkat, dan peraturan yang harus diikuti dalam rangka mengumpulkan dan mencatat data keuangan, kemudian mengolah data tersebut menjadi berbagai laporan untuk pihak luar maupun internal pemerintah daerah yang dijadikan sebagai informasi dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak – pihak yang memerlukan (Mahmudi 2016). Dalam hal ini sistem akuntansi keuangan daerah dapat menyediakan informasi informasi yang akurat yang akan digunakan oleh pihak yang memerlukan. Sistem akuntansi yang digunakan pada akuntansi pemerintah daerah adalah sistem desentralisasi sebagai perpindahan kewenangan atau pembagian kekuasaan dalam perencanaan, pemerintah, manajemen, dan pengambilan keputusan tingkat nasional ke tingkat daerah. Sedangkan menurut Mulyadi (2016) mendefinisikan sitem akuntansi adalah organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa memeberikan informasi keuangan yang memudahkan manajemen dalam pengelolaan.

Pada dasarnya Pemerintah Daerah telah berupaya untuk menyusun laporan keuangan dengan menggunakan sistem akuntansi keuangan daerah yang diharapkan mampu mewujudkan tercapainya transparansi dan akuntabilitas. Dengan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) transparansi dan akuntabilitas yang diharapkan dalam pengelolaan keuangan daerah dapat tercapai (Abdul Halim 2016).

Maka dengan ini dapat disimpulkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah merupakan sistem akuntansi yang terdiri dari seperangkat kebijakan, standar, dan prosedur yang dapat menghasilkan laporan yang relevan, andal, dan tepat waktu untuk menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang digunakan oleh pihak internal dan eksternal pemerintah daerah untuk mengambil keputusan ekonomi.

2.3.1 Ruang Lingkup Sistem Akuntansi Daerah

Menurut peraturan Menteri dalam Negri No 64 Tahun 2013 sitem akuntansi keuangan daerah meliputi :

2.3.1.1 Sistem akuntansi PPKD

Sistem akuntansi PPKD mencakup teknik pencatatan, pengakuan, dan pengungkapan atas pendapatan LO, beban, pendapatan LRA, belanja, transfer, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas, penyesuaian dan koreksi, penyusunan laporan keuangan PPKD serta penyusunan laporan keuangan konsolidasian pemerintah daerah.

2.1.3.1.2 Sistem akuntansi SKPD

Sistem akuntansi SKPD mencakup teknik pencatatan, pengakuan dan pengungkapan atas pendapatan LO, beban, pendapatan LRA, belanja, aset, kewajiban, ekuitas, penyesuaian dan koreksi serta penyusunan laporan keuangan SKPD.

2.3.2 Prosedur Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Prosedur sistem akuntansi keuangan daerah sekurang kurangnya mencakup empat prosedur menurut Halim, (2012:84) antara lain :

2.3.2.1 Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas

Prosedur akuntansi penerimaan kas meliputi pencatatan, pengolongan, peringkasan dan pelaporan keuangan dalam proses mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD yang berkaitan dengan penerimaan kas. Fungsi yang terkait adalah fungsi akuntansi pada pejabat penata usahaan keuangan satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Dokumen yang digunakan antara lain yaitu bukti transfer, STS, nota kredit bank, dan buku besar kas.

2.3.2.2 Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas

Prosedur akuntansi pengeluaran kas meliputi pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan pelaporan keuangan dalam proses mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD yang berkaitan dengan pengeluaran kas. fungsi yang terkait adalah fungsi akuntansi pada pejabat penatausahaan keuangan satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Dokumen yang digunakan adalah SP2D, nota debit bank, dan bukti pengeluaran kas lainnya, yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Prosedur akuntansi pengeluaran kas adalah serangkaian proses baik manual ataupun komputerisasi.

2.3.2.3 Prosedur Akuntansi Aset tetap

Prosedur akuntansi asset merupakan serangkaian proses baik manual maupun komputerisasi, mulai dari pencatatan dan pelaporan akuntansi dalam proses mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD atas perolehan hingga pemeliharaan rehabilitas, penghapusan, pemindahan tanganan, perubahan klasifikasi, dan penyusutan terhadap asset yang dikuasai atau digunakan SKPD. Prosedur akuntansi asset digunakan sebagai alat pengendali dalam pengelolaan

asset yang dikuasai atau digunakan oleh SKPD. Fungsi yang terkait adalah fungsi akuntansi pada pejabat keuangan satuan kerja pada perangkat daerah (SKPD). Bukti transaksi yang digunakan adalah berita acara penerimaan barang, bukti transaksi penghapusan barang, surat keputusan mutase barang, berita acara pemusnahan barang, berita acara penyerahan barang, berita acara penjualan, dan berita acara penyelesaian. Fungsi akuntansi memuat buku memorial, memuat nama aset tetap, kode rekening, klasifikasi asset, nilai, dan transaksi yang kemudian dicatat dalam jurnal.

2.3.2.4 Prosedur Akuntansi Selain Kas

Prosedur akuntansi selain kas merupakan serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan semua transaksi atau kejadian selain kas yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Akuntansi selain kas dapat berupa akuntansi piutang, akuntansi persediaan, akuntansi investasi, akuntansi kewajiban, dan akuntansi ekuitas. Fungsi yang terkait adalah fungsi akuntansi pada pejabat penatausahaan keuangan satuan kerja perangkatn daerah (SKPD). Dokumen yang digunakan adalah bukti memorial, jurnal, buku besar, dan buku besar pembantu.

2.3.2.5 Penyajian Laporan Keuangan

Secara garis besar tujuan umum penyajian laporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk memberikan informasi ang digunakan dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial dal politik serta sebagai bukti pertanggung jawaban dalam pengelolaan.

2.3.3 Indikator Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Ada beberapa indikator sistem akuntansi keuangan daerah menurut Sella Yunita (2019) yaitu sebagai berikut :

2.3.3.1 Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan.

Sistem akuntansi keuangan daerah harus mengacu pada standar akuntansi pemerintahan yang berlaku pada saat ini yaitu berbasis akrual. Basis akrual yaitu mengakui transaksi keuangan pada saat terjadinya yaitu ketika sudah menjadi hak atau kewajibannya meskipun belum diterima atau dikeluarkan kasnya.

2.3.3.2 Pencatatan akuntansi berdasarkan standar pencatatan yang berlaku umum.

Sistem akuntansi keuangan daerah harus dilakukan berdasarkan pencatatan yang berlaku umum yaitu dimana setiap transaksi keuangan yang terjadi dilakukan analisis transaksi di sertai bukti transaksi serta pencatatan transaksi harus dilakukan secara kronologis. Adapun komponen laporan keuangan meliputi laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan.

2.3.3.3 Pembuatan laporan keuangan secara periodik

Sistem akuntansi keuangan daerah menyusun laporan keuangan daerah untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan. Laporan keuangan yang dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah. Laporan keuangan yang dibuat juga harus dilaporkan secara periodik guna kepentingan pengambilan keputusan.

2.4 Keandalan Laporan Keuangan

Keandalan laporan keuangan adalah kemampuan informasi untuk memberi keyakinan bahwa informasi tersebut benar atau valid. Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi dalam setiap laporan keuangan (Muslikha, 2015). Keandalan adalah kualitas yang membuat instrumen itu bisa dipercaya. Bisa dipercaya artinya data dan informasi yang dihasilkannya tidak berubah-ubah, relatif ajeg dari satu waktu ke waktu yang lain agar laporan keuangan sebagai sumber daya dan sarana pendukung yang kompeten (Patrisius Istiarto Djiwandono, 2015).

Keandalan laporan keuangan merupakan informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian bebas dari kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan dan merugikan pengguna laporan keuangan (Pradana, Setiawati, 2018).

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan secara sederhana bahwa keandalan laporan keuangan adalah suatu penerapan perancangan pada komponen sehingga komponen dapat melakukan fungsinya dengan baik, tanpa kegagalan, dan dapat memberikan informasi laporan keuangan yang dapat dipercaya terus menerus kepada publik.

2.4.1 Indikator Keandalan Laporan Keuangan

Indikator keandalan laporan keuangan yang dikemukakan oleh Pradana dan Setiawati (2018) yaitu sebagai berikut :

2.4.1.1 Penyajian fakta secara jujur

Penyajian fakta secara jujur harus digambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

2.4.1.2 Dapat diuji

informasi keuangan yang disusun berdasarkan konsep-konsep dasar akuntansi sehingga dapat diuji kebenarannya, data dan fakta sesuai dengan laporan tertulis. Syarat yang harus dipenuhi dalam penyusunan informasi keuangan atau laporan keuangan yang mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yaitu :

1. Dapat dipahami, artinya system informasi keuangan ini bisa dipahami dengan mudah oleh semua orang.
2. Relevan, sesuai dengan standar yang berlaku dan sesuai dengan kebutuhan pemakai.
3. Keandalan, system informasi akuntansi ini dibuat dengan benar dan dapat diandalkan
4. Dapat dibandingkan, dapat digunakan sebagai pembanding dari waktu ke waktu

2.4.1.3 Netralitas

kualitas laporan keuangan yang penting karena merupakan pertimbangan sehat karena adanya ketidakpastian kelengkapan dapat dibandingkan antar periode dan

antar pemerintah. Netralitas berarti bahwa informasi tidak bergantung pada kebutuhan dan keinginan pihak tertentu.

operasi manajemen, struktur organisasi, serta praktek kepersonaliaan. Lingkungan pengendalian ini amat penting karena menjadi dasar keefektifan unsur-unsur pengendalian intern yang lain. Komponen ini meliputi sikap manajemen di semua tingkatan secara umum dan konsep kontrol secara khusus, hal ini mencakup etika, kompetensi, serta integritas, dan kepentingan terhadap kesejahteraan sosial.

2.4.2 Karakteristik Keandalan Laporan Keuangan

Menurut Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 karakteristik keandalan laporan keuangan meliputi :

2.4.2.1 Penyajian yang jujur

Agar dapat diandalkan informasi dalam laporan keuangan menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

2.4.2.2 Dapat diverifikasi

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.

2.4.2.3 Netralitas

Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

2.4.2.4 Subtansi mengungguli bentuk

Jika informasi dimasukkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi atau peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka peristiwa tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realita.

2.4.2.5 Pertimbangan sehat

Ketidakpastian yang dihadapi dalam penyusunan laporan keuangan diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dan dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan. Pertimbangan sehat menganfung unsur kehati-hatian pada saat melakukan perkiraan dalam kondisi ketidakpastian, sehingga aktiva atau penghasilan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban atau beban tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, seperti pembentukan cadangan tersembunyi atau penyisihan (*provision*) berlebihan dan sengaja menetapkan aktiva atau penghasilan yang lebih rendah atau pencatatan kewajiban atau beban yang lebih tinggi yang membuat laporan keuangan menjadi tidak netral dan akan menjadikan laporan keuangan tidak andal.

2.4.2.6 Kelengkapan

Agar dapat diandalkan, informasi dalam laporan keuangan harus lengkap dalam batasan materialitas dan biaya. Kesengajaan untuk tidak mengungkapkan (*omission*) mengakibatkan informasi menjadi tidak benar atau menyesatkan karena itu tidak dapat diandalkan dan kurang relevansinya.

2.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan suatu hal dalam penyusunan penelitian yang berguna sebagai perbandingan atau rujukan bagi penelitian selanjutnya. Berikut

beberapa penelitian terdahulu berkaitan dengan pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah terhadap keandalan laporan keuangan yang digunakan untuk melandasi penelitian ini dan sebagai penunjang dalam penyusunan penelitian yang akan dilakukan seperti pada tabel berikut ini.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Penulis dan Judul Penelitian	Variabel/Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Alysa Media Wulandari, Drs. Dadang Rahmat, Ak., M.Ak., CA (2021). Pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (studi kasus pada SKPD Kota DKI Jakarta).	Variabel dalam penelitian ini adalah penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian internal dan kualitas laporan keuangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif.	Sistem akuntansi keuangan daerah tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah dan kompetensi keuangan Daerah. Kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan Pemerintah Daerah. Sistem akuntansi keuangan daerah, kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah.
2	Ratna Purnama Sari, Suryani (2019). Determinan keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah pada SKPD Kabupaten Kulon Progo.	Variabel dalam penelitian ini adalah sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern dan keandalan pelaporan keuangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kuantitatif.	Kualitas sumber daya manusia memiliki pengaruh signifikan atas keandalan pelaporan keuangan Pemerintah, sedangkan pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern tidak memiliki pengaruh atas keandalan pelaporan keuangan Pemerintah.
3	Sella Yunita (2019). Pengaruh kompetensi sumber daya insani dan penerapan sistem akuntansi keuangan Daerah terhadap kualitas laporan keuangan	Variabel dalam penelitian ini adalah kompetensi sumber daya insani, penerapan sistem akuntansi keuangan Daerah dan	Kompetensi sumber daya insani berpengaruh positif secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah

	Daerah (Studi Kasus Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat).	kualitas laporan keuangan Daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif.	berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan Daerah. kompetensi sumber daya insani dan penerapan sistem akuntansi keuangan Daerah secara simultan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan Daerah..
4	Rahima, Br. Purba S.E., M.Si., Ak., CA (2018). Pengaruh Penerapan sistem akuntansi, transparansi publik dan aktivitas pengendalian terhadap akuntabilitas keuangan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar.	Variabel dalam penelitian ini adalah penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, transparansi publik, aktivitas pengendalian dan akuntabilitas keuangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kuantitatif.	Sistem akuntansi keuangan simultan, aktivitas transparansi dan pengendalian publik tidak mempengaruhi akuntabilitas keuangan. Sebagaimana sistem akuntansi keuangan daerah, kegiatan transparansi dan pengawasan publik tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan daerah.
5	Aditiya Akbar Putra Pradana, Erma Setiawati (2018). Kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern terhadap keterandalan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah (studi pada Dinas Boyoli).	Variabel dalam penelitian ini adalah kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian intern dan keterandalan pelaporan keuangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kuantitatif.	Kualitas sumber daya manusia dan pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah. Sedangkan pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah.
6	Novtania Mokoginta (2017). Pengaruh sistem pengendalian Intern dan sistem akuntansi keuangan Daerah terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah (studi kasus pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung)	Variabel dalam penelitian ini adalah sistem pengendalian Intern, sistem akuntansi keuangan Daerah dan kualitas laporan keuangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kuantitatif.	Sistem pengendalian intern berpengaruh negatif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah. Sedangkan penerapan sistem akuntansi keuangan Daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah.
7	Christian S, Riza (2017). Pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah terhadap akuntabilitas laporan keuangan Daerah.	Variabel dalam penelitian ini adalah sistem akuntansi keuangan daerah dan akuntabilitas laporan keuangan. Metode yang digunakan	Sistem akuntansi keuangan Daerah berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas laporan keuangan Daerah.

		dalam penelitian ini deskriptif.	
8	Komarasari (2017). Pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern akuntansi terhadap keterandalan pelaporan keuangan Daerah (studi pada SKPD Kabupaten Bantul Bagian Akuntansi dan Keuangan).	Variabel dalam penelitian ini adalah kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian intern akuntansi dan keterandalan pelaporan keuangan Daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif.	Variabel pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern akuntansi berpengaruh secara signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan kapasitas sumber daya manusia tidak berpengaruh secara signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah.
9	Dewi Kusuma Wardani, Ika Andriyani (2017). Pengaruh kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern terhadap keandalan pelaporan keuangan Pemerintah Desa di Kabupaten Klaten.	Variabel dalam penelitian ini adalah kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern dan keandalan pelaporan keuangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif.	Kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan dan sistem pengendalian intern berpengaruh positif secara signifikan terhadap keandalan pelaporan keuangan Pemerintah Desa. Sementara itu pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap keandalan pelaporan keuangan Pemerintah Desa.
10	Yuli Artika (2016). Pengaruh sistem akuntansi keuangan Pemerintah Daerah, kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan Daerah (studi pada SKPD Kabupaten Rokan Hulu).	Variabel dalam penelitian ini adalah sistem akuntansi keuangan Pemerintah Daerah, kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan kualitas laporan keuangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif.	Sistem akuntansi keuangan pemerintah Daerah, kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah.

Hasil dari penelitian di atas sangat beragam serta ada perbedaan antara satu dengan yang lain dikarenakan lokasi penelitian mereka berbeda beda. Namun ada

beberapa penelitian yang memiliki hubungan variabel dengan sistem akuntansi keuangan daerah dan keandalan laporan keuangan, dan disisi lain memiliki perbedaan namun saling berkaitan. Dalam hal tersebut dapat dilihat bahwa Sebagian besar memiliki pengaruh yang signifikan antara sistem akuntansi keuangan daerah terhadap variabelnya sendiri dan Sebagian besar juga tidak berpengaruh antara variabelnya.

Maka dari penelitian di atas dapat dilihat bahwa masih kurang peneliti yang meneliti dan menyangkutpautkan antara variabel sistem akuntansi keuangan daerah terhadap keandalan laporan keuangan..

2.6 Kerangka Konseptual

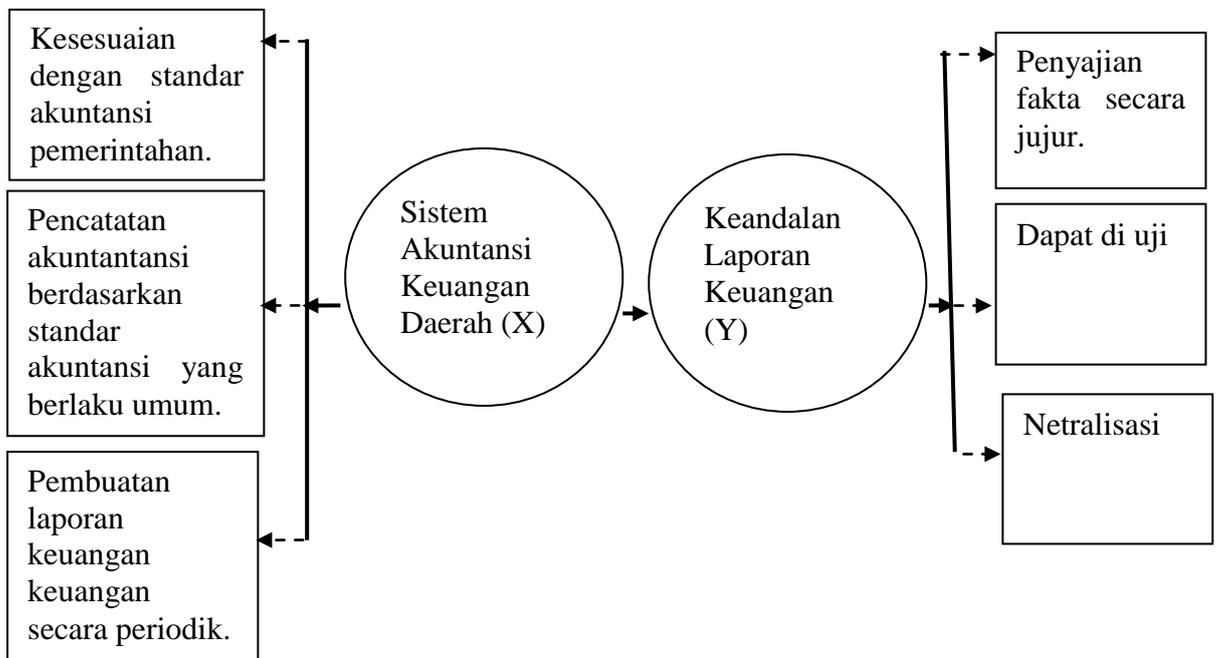
Kerangka konseptual adalah kerangka untuk melihat keterkaitan antara variabel variabel independen dan variabel dependen yang bertujuan untuk mengukur hubungan antara variabel dalam penelitian.

Dalam rangka penelitian ini dimana peneliti membuat suatu sketsa gambar mengenai pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah terhadap laporan keuangan daerah.

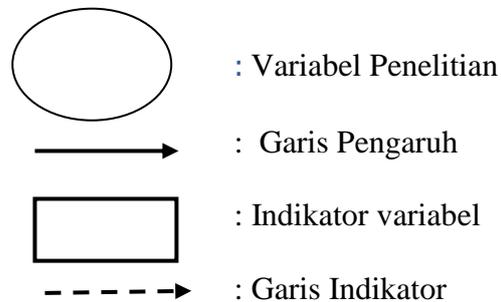
Maka berikut ini kerangka konseptual pada gambar di bawah ini :

sumber ; Sella Yunita, 2019

Pradana, Setiawati, (2018)



Keterangan gambar :



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

2.7 Hipotesis

hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan

data atau kuesioner (Sugiyono, 2017). Berdasarkan penjelasan diatas maka ditarik hipotesis sebagai berikut.

H1 : Diduga bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap keandalan laporan keuangan (studi pada BPKD Kabupaten Luwu).

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, metode analisis data kuantitatif adalah metode yang menggunakan perhitungan angka angka yang nantinya akan dipergunakan untuk mengambil suatu keputusan didalam memecahkan suatu masalah. Sumber data yang digunakan adalah data Primer. Data Primer adalah data yang didapatkan dan dan diperoleh langsung dari objek yang diteliti.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Kabupaten Luwu, dalam membuat penelitian ini waktu yang dibutuhkan untuk mengumpulkan data dan informasi yaitu selama penelitian berlangsung.

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Populasi adalah keseluruhan sumber data yang diperlukan dalam suatu penelitian (Saryono, 2017: 45). Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Luwu.

3.3.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang akan diteliti (Hidayat, 2015: 87). Sampel dalam penelitian ini sebanyak 48 orang diambil menggunakan sampling jenuh yaitu jumlah sampel sama dengan jumlah populasi yang ada.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Berdasarkan jenis dan sumber data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu :

3.4.1 Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data kuantitatif, data data yang diperoleh dalam bentuk angka angka yang masih perlu di analisis kembali.

3.4.2 Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

3.4.2.1 Data primer adalah Data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2016). Sumber data primer didapatkan melalui kegiatan wawancara dengan subjek penelitian dan dengan observasi atau pengamatan langsung di lapangan. Dalam penelitian ini data primer berupa catatan hasil wawancara dan hasil pengamatan langsung di lapangan yang diperoleh melalui wawancara dan kuesioner.

3.4.2.2 Data sekunder adalah data yang diperoleh secara langsung yaitu data dari berbagai sumber seperti dokumen atau laporan yang ada pada kantor BPKD.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting dalam penelitian.

Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut :

3.5.1 Pengamatan (*observasi*), yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamatan langsung pada objek penelitian dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada pegawai kantor BPKAD.

3.5.2 Daftar pernyataan (*questionnaire*), yaitu pengumpulan data dengan menggunakan daftar pernyataan/angket yang sudah dipersiapkan sebelumnya dan diberikan kepada responden.

3.5.3 Dokumentasi, merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara. Hasil penelitian akan lebih dapat dipercaya jika didukung oleh dokumen.

3.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini mengkaji dua variabel yaitu variabel independen dan variabel dependen (Sugiyono, 2018). Sedangkan definisi operasional disebut sebagai pengoperasian konsep yang dapat diobservasi yang disebabkan dapat diukur dan dioperasionalkan.

Sesuai dengan penelitian yang diajukan mengenai pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah terhadap keandalan laporan keuangan ada 2 variabel dalam penelitian ini.

Definisi operasional masing masing variabel sebagai berikut :

3.6.1 Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah merupakan pelaksanaan dari Permendagri No. 21 Tahun 2011 mulai dari pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan yang digunakan sebagai pedoman penyajian informasi laporan keuangan dalam konteks pengambilan keputusan. Sistem akuntansi keuangan daerah akan menghasilkan laporan semester dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran.

Pemimpin daerah menetapkan sistem akuntansi keuangan daerah mengacu pada Peraturan daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintahan yang dilakukan di Kantor BPKD Kabupaten Luwu.

3.6.2 Keandalan Laporan Keuangan

Keandalan laporan keuangan memiliki atau bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan penyajiannya dengan tulus atau jujur. Keandalan laporan keuangan adalah suatu penerapan perancangan pada komponen sehingga komponen dapat melakukan fungsinya dengan baik, tanpa kegagalan, sesuai rancangan atau proses yang dibuat. Keandalan merupakan probabilitas dalam laporan keuangan dengan fungsi yang diharapkan. Keandalan merupakan kemampuan informasi laporan keuangan terus menerus tanpa adanya kerusakan serta kerugian.

3.7 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian digunakan sebagai alat pengumpulan data, dan instrumen yang lazim digunakan dalam penelitian adalah beberapa daftar pertanyaan serta kuesioner yang disampaikan dan diberikan kepada masing - masing responden yang menjadi sampel dalam penelitian pada saat observasi (Sugiyono, 2017). dengan terlebih dahulu melakukan pengujian dengan uji validitas dan reliabilitas.

3.7.1 Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner. Kuesioner dikatakan valid apabila pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali,

2016). Dalam penelitian ini, peneliti melakukan uji validitas menggunakan SPSS. Pengukuran dilakukan dengan mengkorelasikan skor butir pertanyaan dengan total skor variabel independen maupun variabel dependen. Pengujian dalam penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi 5% dengan kriteria pengujian sebagai berikut:

jika nilai t hitung $>$ t tabel maka disimpulkan butir pertanyaan valid.

jika nilai t hitung $<$ t tabel maka butir pertanyaan dikatakan tidak valid.

3.7.2 Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2016). Adapun cara yang digunakan untuk menguji reliabilitas kuesioner dalam penelitian ini adalah menggunakan rumus koefisien Alpha Cronbach 0,600. Untuk mengetahui kuesioner tersebut sudah reliabel akan dilakukan pengujian reliabilitas kuesioner dengan bantuan komputer program SPSS.

3.8 Analisis Data

3.8.1 Metode Analisis Deskriptif

Metode analisis deskriptif merupakan cara untuk memberikan gambaran atau deskripsi pada suatu data yang dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai permasalahan. Analisis deskriptif dilakukan peneliti yaitu dengan mendistribusikan jawaban responden dalam bentuk tabel sehingga memperoleh gambaran yang jelas tentang distribusi jawaban responden.

3.8.2 Analisis Regresi Sederhana

metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi sederhana yaitu sebuah metode pendekatan untuk pemodelan hubungan antara satu variabel dependen dan satu variabel independen. Dalam analisis regresi sederhana hubungan antara variabel bersifat linear, dimana perubahan pada variabel X diikuti oleh perubahan pada variabel Y secara tetap.

Adapun metode analisis yang digunakan adalah menggunakan metode analisis regresi sederhana dengan formulasi matematis sebagai berikut :

$$Y = a + bX$$

Keterangan :

Y : variabel response atau variabel akibat (Dependen)

X : variabel predictor atau variabel faktor penyebab (Independen)

a : Konstanta

b : koefisien regresi (kemiringan); besaran response yang ditimbulkan oleh predictor

3.8.3 Koefisien determinasi

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya Untuk mengukur besarnya proporsi atau presentasi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen maka dilakukan pengujian koefisien determinan. Koefisien determinan berkisar antara nol sampai dengan satu ($0 \leq R^2 \leq 1$). Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan mengenai variabel - variabel independen dalam menjelaskan variasi beberapa variabel dependen amat terbatas. Nilai yang telah mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk

memprediksi variasi pada variabel dependen. “Secara umum koefisien determinasi untuk data silang relative rendah karena adanya variasi yang besar antara masing – masing pengamatan, sedangkan untuk data runtun waktu (time series) biasanya mempunyai nilai koefisien determinasi yang lebih tinggi.”

3.8.4 Uji T

Uji T digunakan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen secara parsial berpengaruh nyata atau tidak terhadap variabel dependen. Derajat signifikansi yang digunakan adalah 0,05. Apabila nilai signifikan lebih kecil dari derajat kepercayaan maka kita menerima hipotesis alternatif, yang menyatakan bahwa suatu variabel independen secara parsial mempengaruhi variabel dependen. Analisis uji T juga dilihat dari tabel ”*Coefficient*”.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Badan Pengelola Keuangan Daerah di bentuk berdasarkan pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan undang – undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan undang – undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, dalam memeberikan kewenangan daerah menyusun struktur organisasi dan perangkat daerah. Badan Pengelola Keuangan daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan urusan pemerintahan daerah bedasarkan otonomi daerah sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.

BPKD Kabupaten Luwu dibentuk dengan pertimbangan agar pelaksanaan fungsi pengelola keuangan, penyelenggaraan penatausahaan keuangan serta pengelola asset daerah dapat dilaksanakan lebih baik dengan mengancu seluruh potensi sumber daya yang terdapat di Kota Belopa.

4.1.2 Visi, Misi Dan Struktur BPKD Kabupaten Luwu

Visi BPKD Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah. Dalam konteks RPJMD, visi pembangunan daerah adalah visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang

disampaikan pada waktu Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Oleh karena itu, visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 merupakan penjabaran dari visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Visi RPJMD menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun. Visi yang hendak dicapai Kabupaten Luwu dalam periode Tahun 2019–2024 adalah:

“Kabupaten Luwu Yang Maju, Sejahtera Dan Mandiri Dalam Nuansa Religi”

Rumusan Visi Kabupaten Luwu 2019-2024 tersebut di atas, mengandung 4 (empat) frasa yang penting untuk diberikan penjabaran makna atau terdapat 4 (empat) pilar pokok yang penting untuk diberikan penjelasan, yaitu :

1. **Maju** : Kondisi masyarakat yang menikmati standar hidup yang relatif tinggi, yang ditandai dengan pemanfaatan teknologi, ekonomi yang merata, sumber daya manusia yang berkualitas (adaptif dan kompetitif), derajat kesehatan yang membaik, dan terpenuhinya hak pendidikan dasar, tercapainya tujuan pembangunan fisik dan non fisik, serta birokrasi yang profesional, inovatif, dan responsif.
2. **Sejahtera** : Kondisi dimana masyarakat Kabupaten Luwu memiliki tata kehidupan dan penghidupan, mampu memenuhi kebutuhan dasar secara berkelanjutan (material maupun spiritual), yang dilingkupi dengan suasana kehidupan yang religius, aman dan tentram.
3. **Mandiri** : Mampu memberdayakan seluruh potensi yang ada untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat secara berkelanjutan.

4. Religi : Kehidupan masyarakat Kabupaten Luwu yang mengamalkan nilai-nilai agama dan budaya, yang tercermin dalam tatanan kehidupan masyarakat aman, tentram dan nyaman.

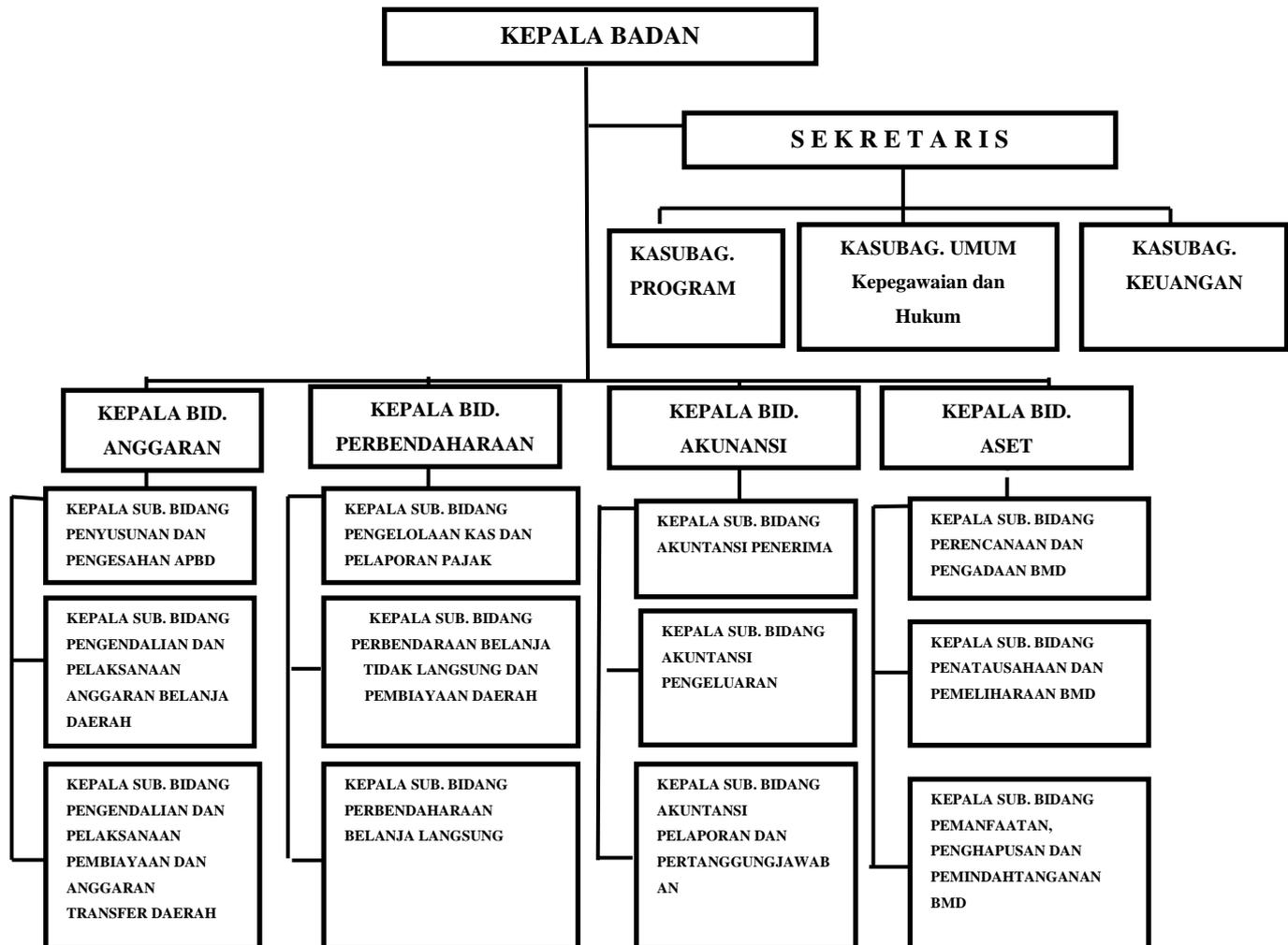
Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi yang dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi melalui rumusan strategi dan arah kebijakan. Memperhatikan visi serta perubahan paradigma pembangunan daerah dan kondisi yang akan dicapai pada masa yang akan datang, maka dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024, misi pembangunan daerah Kabupaten Luwu beserta penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Pemerintahan Yang Profesional, Berwibawa, Amanah, Transparan, dan Akuntabel.
2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pendidikan Dan Kesehatan Yang Terjangkau Bagi Semua Lapisan Masyarakat.
3. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas dan Berkelanjutan.
4. Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Melalui Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah Dan Perluasan Lapangan Kerja.

5. Mewujudkan Ketahanan Pangan Dan Perekonomian Daerah Yang Tangguh Berbasis Agribisnis.
6. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama Dalam Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Luwu Yang Religius.
7. Optimaslisasi Otonomi Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
8. Menciptakan Iklim Investasi dan Usaha Yang Kondusif Berwawasan Lingkungan.
9. Penegakan Supremasi Hukum, Hak Asasi Manusia, Untuk Mendorong Partispasi Publik.
10. Mewujudkan Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Serta Penanggulangan Bencana.

Adapun struktur organisasi Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten

Luwu sebagai berikut:



Gambar 4.1 Struktur Organisasi BPKD Kabupaten Luwu

4.1.3 Gambaran Umum Variabel Pada BPKD Kabupaten Luwu

1. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Sistem akuntansi keuangan daerah pada BPKD Kabupaten Luwu sudah relatif baik karena telah sesuai dengan SAP serta mencakup beberapa prosedur yang menjadi dasar dalam penyusunan laporan keuangan antara lain:

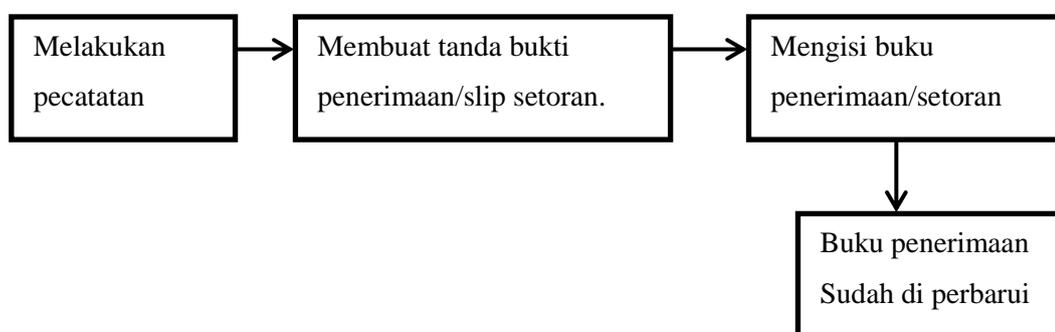
a. Prosedur Akuntansi Penerimaan

Akuntansi penerimaan mencakup beberapa prosedur antara lain :

1. Pelaksanaan pengolahan penerimaan kas daerah.
2. Pengkajian ulang hasil verifikasi penerimaan anggaran kas daerah
3. Penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan penerimaan kas daerah.
4. Pemantauan atas identifikasi, klasifikasi dan pengukuran data transaksi penerimaan yang dilakukan oleh SKPD.
5. Pemantauan atas identifikasi, klasifikasi dan pengukuran data transaksi penerimaan yang dilakukan oleh SKPD.
6. Pemantauan atas pencatatan, penggolongan atas transaksi penerimaan yang dilakukan oleh SKPD.
7. Pemantauan atas pengikhtisarkan penerimaan kas dan non kas yang dilakukan oleh SKPD.
8. Pemantauan atas posting penerimaan yang dilakukan oleh SKPD.
9. Pelaksanaan rekonsiliasi atas realisasi penerimaan dengan SKPD non BLUD, BLUD dan PPKD.
10. Pelaksanaan konsolidasi laporan penerimaan berdasarkan laporan penerimaan SKPD non BLUD, BLUD dan PPKD.
11. Penganalisaan laporan realisasi penerimaan.
12. Penyusunan laporan realisasi penerimaan APBD priodik (bulanan, triwulanan, semesteran, dan tahunan).

13. Verifikasi, analisa, koreksi terhadap kesalahan realisasi penerimaan (bukti memorial).
14. Penyusunan kebijakan serta sistem dan prosedur akuntansi penerimaan.
15. Penyusunan, pengoreksian dan penyempurnaan konsep naskah dinas yang terkait dengan penerimaan.

Pada prosedur akuntansi penerimaan SOP yang digunakan pada BPKD sebagai berikut:



Gambar 4.2 SOP Akuntansi Penerimaan

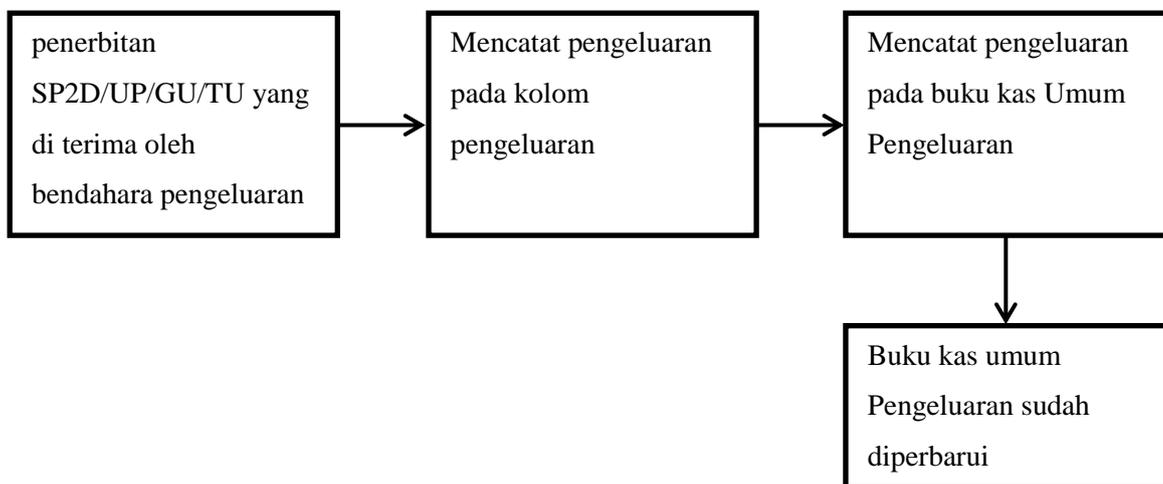
b. Prosedur Akuntansi Pengeluaran

Akuntansi pengeluaran mencakup beberapa prosedur antara lain :

1. Penerimaan laporan pertanggungjawaban fungsional (UP, GU, TU) bendahara pengeluaran SKPD.
2. Pelaksanaan koordinasi dengan seluruh SKPD.
3. Pelaksanaan pembinaan atas bendahara pengeluaran SKPD.
4. Penginventarisasian permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah.
5. Penganalisan laporan realisasi pengeluaran.

6. Penyusunan kebijakan serta sistem dan prosedur akuntansi pengeluaran.
7. Penyusunan, pengoreksian, dan penyempurnaan konsep naskah dinas yang terkait dengan pengeluaran.
8. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program/kegiatan serta membuat laporan hasil pelaksanaan tugas.

Pada prosedur akuntansi pengeluaran kas SOP yang digunakan pada BPKD sebagai berikut:



Gambar 4.3 SOP Akuntansi Pengeluaran

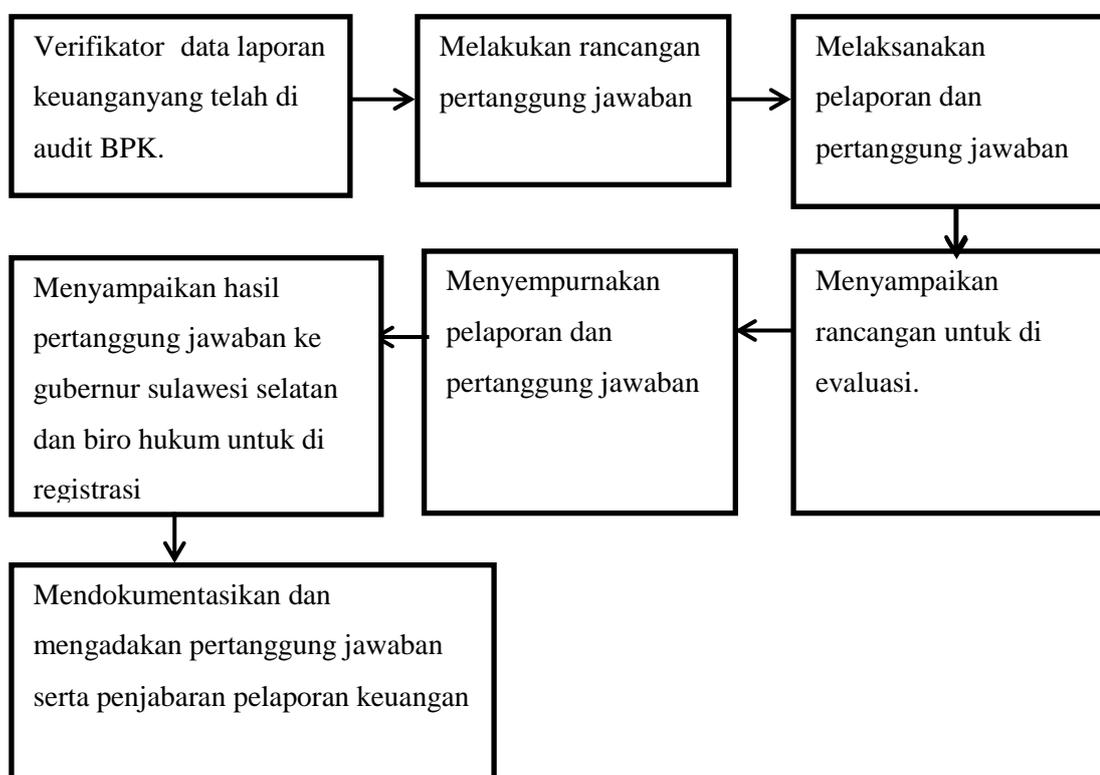
c. **Prosedur Akuntansi Pertanggung Jawaban**

1. Pelaksanaan pembukuan anggaran penerimaan kas daerah
2. Pelaksanaan teknis pembukuan anggaran pengeluaran kas daerah.
3. Pelaksanaan bimbingan teknis penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
4. Penyusunan kebijakan serta sistem dan prosedur terkait penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
5. Penyiapan bahan penyesuaian atas transaksi non kas.

6. Pelaksanaan konsolidasi laporan keuangan BLUD kedalam laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
7. Penyusunan konsolidasi Laporan Realisasi APBD Semester I dan Prognosis 6 (enam) bulan berikutnya.
8. Penyusunan laporan keuangan konsolidasi atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
9. Penyusunan laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.
10. penyusunan Ikhtisar Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu; k. Penyusunan Ikhtisar Laporan Keuangan BUMD.
11. Penyusunan bahan untuk tanggapan terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.
12. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.
13. Penyiapan bahan koordinasi dan menyusun jawaban eksekutif dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
14. Penyiapan bahan tindak lanjut hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
15. Penyiapan bahan untuk analisa Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

16. Pelaksanaan pembinaan, sosialisasi tentang penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu sesuai system Akuntansi Pemerintah Daerah.
17. Penyusunan, pengoreksian, dan penyempurnaan konsep naskah dinas yang terkait dengan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Pada prosedur akuntansi pertanggungjawaban SOP yang digunakan pada BPKD sebagai berikut:



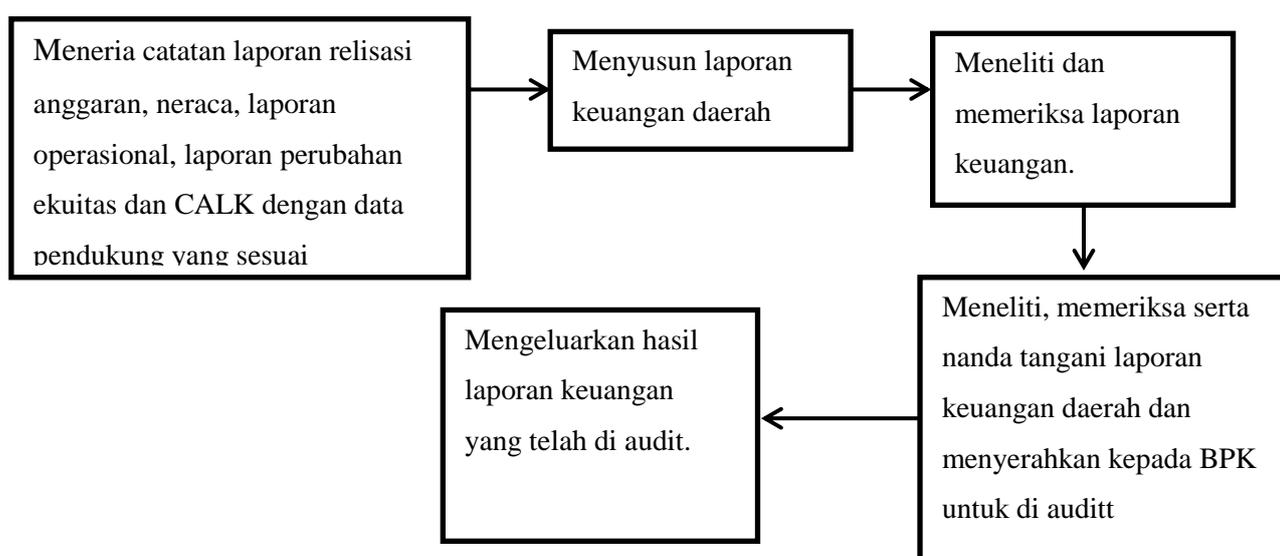
Gambar 4.4 SOP Akuntansi Pertanggungjawaban

2. Keandalan Laporan Keuangan

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada Satuan Kerja lainnya selaku Pengguna Anggaran dan Barang terkait dengan kewajiban masing-masing OPD dalam menyusun dan menyampaikan laporan keuangannya kepada Bupati melalui

BPKD Laporan Keuangan ini sebelum disampaikan kepada DPRD terlebih dahulu telah di audit oleh BPK. Untuk menyajikan Laporan pengelolaan aset sesuai Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Maka dipergunakan SIMDA BMD agar pengelolaan aset dapat disajikan dalam Laporan Keuangan sesuai dengan tata kelola keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), yaitu kecukupan pengungkapan, ketepatan waktu, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektifitas system pengendalian intern. Berdasarkan perbaikan beberapa hal tersebut opini BPK terhadap Laporan Keuangan mulai tahun 2015, 2016, 2017 dan 2018 empat tahun berturut turut mendapatkan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), atas prestasi tersebut pemerintah Kabupaten Luwu mendapat Dana Insentif Daerah (DID) sebagai bentuk penghargaan atas Laporan Keuangan yang mendapat opini WTP dari BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan.

Untuk menghasil keandalan laporan keuangan SOP yang harus dilalui sebagai berikut:



Gambar 4.5 SOP Keandalan Laporan Keuangan

4.2 Karakteristik Responden

Berdasarkan penelitian yang dilakukan selama dua bulan peneliti memperoleh data dari responden yang telah di berikan lembar koesioner oleh peneliti antara lain:

4.2.1 karakteristik responden berdasarkan usia

krakteristik responden berdasarkan usia yaitu menguraikan usia yang dikelompokkan menjadi 3 kelompok yaitu usia 21 – 30 tahun, 31 – 40 tahun dan usia > 40 tahun, adapun krakteristik responden berdasarkan usia dapat disajikan melalui tabel berikut :

tabel 4.1 karakteristik responden berdasarkan usia

No	Usia	Jumlah	Persentase (%)
1	21-30 tahun	4	8,3
2	31-40 tahun	20	41,7
3	> 40 tahun	24	50,0
Jumlah		48	100

Sumber : data diolah (2021)

Berdasarkan output diatas tentang krakteristik responden berdasarkan usia, dapat kita ketahu bahwa jumlah responden yang berusia 21-30 tahun yaitu sebanyak 4 orang dengan persentase sebanyak 8,3% dari seluruh jumlah responden, responden yang berusia 31-40 tahun yaitu sebanyak 20 orang dengan nilai persentase sebanyak 41,7% serta responden yang berusia > 40 tahun sebanyak 24 orang dengan nilai persentase sebanyak 50,0% dari seeluruh jumlah responden.

4.2.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

krakteristik responden berdasarkan jenis kelamin yaitu menguraikan jenis kelamin yang dikelompokkan menjadi 2 kelompok yaitu laki-laki dan perempuan, adapun

krakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dapat disajikan melalui tabel berikut :

Tabel 4.2 Krakteristik responden berdasarkan jenis kelamin

No	Jenis kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1	Laki-laki	18	37,5
2	Perempuan	30	62,5
Jumlah		48	100

Sumber : data diolah (2021)

Berdasarkan output diatas tentang krakteristik responden berdasarkan jenis kelamin, dapat kita ketahui bahwa jumlah responden yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 18 orang dengan nilai persentase sebanyak 37,5% dari seluruh jumlah responden dan responden yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 30 orang dengan nilai persentase sebanyak 62,5% dari seeluruh jumlah responden.

4.2.3 Krakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan

krakteristik responden berdasarkan pendidikan yaitu menguraikan tingkat pendidikan terakhir responden yang di kelompokkan menjadi 3 yaitu SMA/SMK, Diploma dan Sarjana, adapun krakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhir dapat disajikan melalui tabel berikut :

Tabel 4.3 Karakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhir

No	Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1	SMA	4	8,3
2	D3	1	2,1
3	S1	29	60,4
4	S2	14	29,9
Jumlah		47	100

Berdasarkan output diatas tentang krakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhir, dapat kita ketahui bahwa jumlah responden yang berpendidikan terakhir SMA/SMK sebanyak 4 orang dengan nilai persentase

sebanyak 8,3% dari seluruh jumlah responden, responden yang yang berpendidikan terakhir diploma (D3) sebanyak 1 orang dengan nilai persentase sebanyak 2,1% dari seeluruh jumlah responden, responden yang yang berpendidikan terakhir sarjana (S1 dan S2) sebanyak 29 dan 14 orang dengan nilai persentase sebanyak 60,4% dan 29,9 dari seeluruh jumlah responden.

4.2.4 Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui antar butir pernyataan dengan total item pernyataan untuk masing – masing variabel yaitu sistem akuntansi keuangan daerah (X) dan keandalan laporan keuangan (Y) sebagai berikut :

Tabel 4.4 Uji validitas variabel sistem akuntansi keuangan daerah

Pernyataan	r-hitung	r-tabel	Keterangan
P1	0,442	0,284	Valid
P2	0,836	0,284	Valid
P3	0,846	0,284	Valid
P4	0,809	0,284	Valid
P5	0,831	0,284	Valid
P6	0,881	0,284	Valid
P7	0,520	0,284	Valid
P8	0,932	0,284	Valid
P9	0,725	0,284	Valid
P10	0,918	0,284	Valid
P11	0,947	0,284	Valid
P12	0,533	0,284	Valid
P13	0,371	0,284	Valid
P14	0,822	0,284	Valid
P15	0,473	0,284	Valid

Sumber : data lampiran

Untuk mengukur nilai validitas sistem akuntansi keuangan daerah (X) ditentukan dengan melihat nilai dengan jumlah responden sebanyak 48 orang sehingga nilai pada tabel *product moment* dan di dapat nilai $r = 0,284$. Jika hasil validitas berada diatas 0,284 maka di anggap pernyataan sudah valid. Hasil analisi validitas pada tabel 4.3 diatas $r = 0,284$ sehingga dapat disimpulkan bahwa 15

butir pernyataan pada variabel sistem akuntansi keuangan daerah (X) dinyatakan valid dan sudah layak untuk dijadikan pengukuran variabel penelitian.

Tabel 4.5 Uji validitas variabel keandalan laporan keuangan

Pernyataan	r-hitung	r-tabel	Keterangan
P1	0,818	0,284	Valid
P2	0,876	0,284	Valid
P3	0,862	0,284	Valid
P4	0,415	0,284	Valid
P5	0,646	0,284	Valid
P6	0,605	0,284	Valid
P7	0,686	0,284	Valid
P8	0,289	0,284	Valid
P9	0,725	0,284	Valid
P10	0,900	0,284	Valid
P11	0,604	0,284	Valid
P12	0,806	0,284	Valid
P13	0,640	0,284	Valid
P14	0,527	0,284	Valid

Sumber : data lampiran

Untuk mengukur nilai validitas keandalan laporan keuangan (Y) ditentukan dengan melihat nilai dengan jumlah responden sebanyak 48 orang sehingga nilai pada tabel *product moment* dan di dapat nilai $r = 0,284$. Jika hasil validitas berada diatas 0,284 maka di anggap pernyataan sudah valid. Hasil analisi validitas pada tabel 4.3 diatas $r = 0,284$ sehingga dapat disimpulkan bahwa 15 butir pernyataan pada variabel keandalan laporan keuangan (Y) dinyatakan valid dan sudah layak untuk dijadikan pengukuran variabel penelitian.

4.2.5 Uji Reabilitas

Uji reabilitas dilakukan untuk mengetahui ukuran kestabilan dan konsistensi responden dalam menjawab hal yang berkaitan dengan pernyataan dalam bentuk koesioner.

Tabel 4.6 Uji realibilitas

Variabel	r Alpha	Nilai Reabilitas	Keterangan
Sistem akuntansi keuangan daerah	0,935	0,600	Reliabel
Keandalan laporan keuangan	0,911	0,284	Reliabel

Sumber: Data lampiran

Dasar keputusan :

Alpha > R tabel

- a. Jika r alpha > 0,600 maka reliabel
- b. Jika r alpha < 0,600 maka tidak reliabel

Analisis tabel 4.5 menunjukkan bahwa hasil pengujian realibilitas pada koesioner dengan nila Cronbach's alpha atau r alpha sebesar 0,935 dan 0,911. Hal ini membuktikan koesioner adalah reliabel karena r alpha memiliki nilai lebih besar dari 0,600.

4.3 Hasil Penelitian

4.3.1 Analisis Deskriptif

Sebaran jawaban responden terhadap variabel sistem akuntansi keuangan daerah (X) dan keandalan laporan keuangan (Y) dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

1. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X)

Tabel 4.7 Sebaran jawaban responden tentang sistem akuntansi keuangan daerah

No	Pernyataan	STS (1)	TS (2)	KS (3)	S (4)	SS (5)
1	Sistem akuntansi keuangan diterapkan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah	0	0	0	23	25
2	Basis akuntansi penyusunan laporan keuangan pada dinas ini berbasis akrual.	0	0	4	34	10
3	Pada dinas ini peristiwa ekonomi diakui pada saat transaksi terjadi.	0	0	4	34	10
4	Pencatatan transaksi sesuai prosedur dengan standar akuntansi pada umumnya.	0	4	0	25	19
5	Sistem akuntansi sekurang kurangnya memuat 4	0	0	4	35	9

	prosedur dan 1 penyajian laporan keuangan sebagai pelengkap					
6	Dinas ini melaksanakan prosedur penerimaan kas, pengeluaran kas, akuntansi aset tetap sesuai dengan sistem akuntansi.	0	4	0	22	22
7	Dinas ini melaksanakan prosedur selain kas (akuntansi piutang, akuntansi persediaan, akuntansi investasi, akuntansi kewajiban, dan akuntansi ekuitas).	0	0	0	31	17
8	Dinas ini melakukan pengklafikasian atas transaksi dan pembukuan berpasangan.	0	4	0	33	11
9	Hasil pencatatan laporan keuangan pemerintah daerah dapat di akses dengan mudah.	4	4	0	29	11
10	Dinas ini membuat laporan keuangan setiap priode akuntansi.	0	4	0	29	15
11	Pada dinas ini melakukan sistem pengendalian dalam mengukur dan melaporkan pencatatan.	0	4	0	37	7
12	Pendapatan LRA, belanja dan pembiayaan merupakan unsur yang terdapat dalam LRA.	0	0	0	38	10
13	Pendapatan LO, beban, transfer dan pos – pos luar biasa merupakan unsur yang terdapat dalam laporan operasional.	0	0	0	36	12
14	Aktivitas operasi, aktivitas pendanaan, dan aktivitas investasi merupakan unsur dari laporan keuangan.	0	2	2	36	8
15	Pelaporan laporan keuangan dilakukan secara konsisten dan priodik	0	0	0	27	21

2. Keandaan Laporan Keuangan (Y)

Tabel 4.8 Sebaran jawaban responden tentang sistem akuntansi keuangan daerah

No	Pernyataan	STS (1)	TS (2)	KS (3)	S (4)	SS (5)
1	Laporan keuangan pada dinas ini telah menghasilkan informasi yang jujur sesuai transaksi yang terjadi dan peristiwa keuangan lainnya yang seharusnya disajikan.	0	4	0	16	28
2	Informasi yang dilaporkan dalam laporan keuangan pada dinas tempat Bapak/Ibu bekerja bebas telah bebas dari hal hal yang menyesatkan.	0	0	4	7	37
3	Dinas tempat Bapak/Ibu bekerja dapat Menyediakan informasi yang jelas	0	0	0	14	34
4	Laporan keuangan pada dinas Bapak/Ibu bekerja menyediakan telah menghasilkan informasi yang lengkap mencakup semua informasi yang dibutuhkan guna pengambilan keputusan.	0	0	0	15	33
5	Laporan keuangan pada dinas tempat Bapak/Ibu bekerja telah menyediakan informasi yang dapat	0	0	0	31	17

	mengoreksi aktivitas keuangan dimasa lalu.					
6	Dinas tempat Bapak/Ibu bekerja mendapatkan hasil audit atas laporan keuangan yang dilakukan oleh inspektorat tidak berbeda dengan hasil audit atas laporan keuangan antar priode secara konsisten.	0	0	0	30	18
7	Informasi dalam laporan keuangan yang di hasilkan oleh dinas tempat Bapak/Ibu bekerja telah memenuhi kebutuhan para pengguna dari laporan keuangan pemerintah.	0	0	0	27	21
8	Laporan keuangan yang disajikan sudah akurat dan terpercaya sehingga tidak ada manipulasi data	0	0	0	11	37
9	Laporan keuangan yang dikeluarkan sudah sesuai dengan yang dipublikasikan untuk publik.	0	0	4	15	29
10	Laporan keuangan yang disajikan pemerintah diungkapkan secara jelas dan terpercaya.	0	0	0	25	23
11	Pada dinas tempat Bapak/Ibu bekerja pelaporan laporan keuangan dilakukan secara konsisten dan periodik	0	4	0	26	18
12	Bersikap netral dalam pembukuan data keuangan.	4	0	0	25	19
13	Pelaporan keuangan yang dihasilkan oleh dinas tempat Bapak/Ibu bekerja disajikan untuk kepentingan umum dan tidak berpihak pada kepentingan pihak tertentu.	0	1	1	35	11
14	Pada dinas tempat Bapak/Ibu bekerja dalam penyusunan laporan keuangan harus bersikap adil.	0	1	1	36	10

4.3.2 Analisis Regresi Sederhana

Analisis regresi sederhana dilakukan untuk mengetahui hubungan antara variabel bersifat linear, dimana perubahan pada variabel X diikuti oleh perubahan pada variabel Y secara tetap. Adapun metode analisis yang digunakan adalah menggunakan metode analisis regresi sederhana dengan formulasi matematis sebagai berikut :

$$Y = a + bX$$

Keterangan :

Y : variabel response atau variabel akibat (Dependen)

X : variabel predictor atau variabel faktor penyebab (Independen)

a : Konstanta

b : koefisien regresi (kemiringan); besaran response yang ditimbulkan oleh *predictor*

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil yang telah diolah kedalam model perhitungan komputer dengan menggunakan program SPSS 24 dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 4.9 Regresi linear sederhana

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	26,157	5,076		5,153	0,000
	sistem akuntansi keuangan daerah	0,646	0,080	0,764	8,037	0,000

a. Dependent Variable: keandalan laporan keuangan

Berdasarkan tabel di atas, dapat dibuat model estimasi sebagai berikut :

$$Y = 26,157 + 0,646 X$$

Intrepretasi model tersebut di atas, yaitu :

- a. Nilai a (konstanta) sebesar 26,157 artinya tingkat signifikan sebesar $0,000 < 0,05$ maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksi sistem akuntansi keuangan daerah atau dengan kata lain ada pengaruh variabel sistem akuntansi keuangan daerah (X) terhadap variabel keandalan laporan keuangan (Y).

- b. Nilai koefisien sistem akuntansi keuangan daerah (b) sebesar 0,646. Artinya, setiap ada kenaikan variabel sistem akuntansi keuangan daerah (X) sebesar satu satuan maka akan meningkatkan keandalan lapoan keuangan sebesar 0,646

4.3.3 Koefisien Determinasi (R^2)

Berdasarkan data yang di peroleh dari hasil yang telah diolah kedalam model perhitungan dengan menggunakan program SPSS 24 dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

Tabel 4.10 Koefisien determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,764 ^a	0,584	0,575	4,014
a. Predictors: (Constant), sistem akuntansi keuangan daerah				

Dari output diatas, didapatkan nilai Ajusted R Square (koefisien determinasi) sebesar 0,575 yang artinya pengaruh variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y) sebesar 57,5 %, sedangkan sisanya sebesar 42,5% (100% - 0,575) dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

4.3.4 Uji T Statistik (Uji Parsial)

Berdasarkan hasil persamaan model dapat diketahui variabel independen terhadap keandalan laporan keuangan. Untuk mengetahui pengaruh nyata variabel secara parsial dapat dilakukan dengan uji t dengan dasar pengambilan keputusan yaitu :

Jika $\text{sig} < 0,05 / \text{Thitung} > \text{Ttabel} =$ maka terdapat pengaruh

Jika $\text{sig} > 0,05 / \text{Thitung} < \text{Ttabel} =$ maka tidak terdapat pengaruh

Tabel 4.11 Uji t

Coefficients ^a			
Model		t	Sig.
1	(Constant)	5,153	0,000
	sistem akuntansi keuangan daerah	8,037	0,000

a. Dependent Variable: keandalan laporan keuangan

Berdasarkan output diatas nilai t hitung sistem akuntansi keuangan daerah (X) adalah 8,037. Sedangkan dalam menentukan nilai t tabel pada penelitian ini, dapat dilihat pada tabel t yang sudah ada dengan nilai signifikansi yang digunakan adalah 0,05. Selanjutnya tentukan nilai t tabel dengan melihat tabel t. Pada penelitian ini nilai signifikansi 0,05 dan Df adalah 46, sehingga diperoleh nilai t tabel adalah 1,678.

Maka nilai signifikan sistem akuntansi keuangan daerah sebesar $0,000 < t$ -hitung sebesar $8,037 > t$ - tabel sebesar 1,678 , dengan demikian hipotesis diterima. Ini berarti bahwa variabel sistem akuntansi keuangan daerah signifikan dan berpengaruh nyata terhadap variabel keandalan laporan keuangan 95%.

4.4 Pembahasan Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial nilai signifikan sistem akuntansi keuangan daerah sebesar $0,000 < t$ -hitung sebesar $8,037 > t$ -tabel sebesar 1,678, dengan demikian hipotesis diterima. Ini berarti bahwa variabel sistem akuntansi keuangan daerah signifikan dan berpengaruh nyata terhadap variabel keandalan laporan keuangan.

Sistem akuntansi keuangan daerah dapat didefinisikan sebagai kumpulan dari subsistem-subsistem yang didalam setiap subsistem tersebut terdapat tahap-

tahap, prosedur, perangkat, dan peraturan yang harus diikuti dalam rangka mengumpulkan dan mencatat data keuangan, kemudian mengolah data tersebut menjadi berbagai laporan untuk pihak luar maupun internal pemerintah daerah yang dijadikan sebagai informasi dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak – pihak yang memerlukan (Mahmudi 2016).

Keandalan laporan keuangan adalah kemampuan informasi untuk memberi keyakinan bahwa informasi tersebut benar atau valid. Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi dalam setiap laporan keuangan (Muslikha, 2015). Keandalan adalah kualitas yang membuat instrumen itu bisa dipercaya. Bisa dipercaya artinya data dan informasi yang dihasilkannya tidak berubah-ubah, relatif ajeg dari satu waktu ke waktu yang lain agar laporan keuangan sebagai sumber daya dan sarana pendukung yang kompeten (Patrisius Istiarto Djiwandono, 2015). Dengan adanya laporan keuangan yang andal dapat melakukan fungsinya dengan baik, tanpa kegagalan, dan dapat memberikan informasi laporan keuangan yang dapat dipercaya terus menerus kepada pihak organisasi, manajemen, dan publik. Dengan sistem akuntansi keuangan daerah pihak organisasi akan memudahkan dalam menyusun dan menghasilkan informasi yang akurat dalam bentuk laporan keuangan yang dibutuhkan oleh pihak internal dan eksternal pemerintah daerah untuk mengambil keputusan ekonomi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Christian S, Riza (2017), yang berjudul pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah terhadap akuntabilitas laporan keuangan daerah. Hasil penelitian Christian S, Riza menunjukkan bahwa

Sistem akuntansi keuangan Daerah berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas laporan keuangan Daerah. Sejalan juga dengan Alysa Media Wulandari, Drs. Dadang Rahmat, Ak., M.Ak., CA (2021). Pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (studi kasus pada SKPD Kota DKI Jakarta). Hasil penelitian Alysa Media Wulandari, Drs. Dadang Rahmat, Ak., M.Ak., CA (2021) menunjukkan bahwa Sistem akuntansi keuangan daerah tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah dan kompetensi keuangan Daerah. Kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan Pemerintah Daerah. Sistem akuntansi keuangan daerah, kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah.

Sejalan juga dengan penelitian Komarasari (2017). Pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern akuntansi terhadap keterandalan pelaporan keuangan Daerah (studi pada SKPD Kabupaten Bantul Bagian Akuntansi dan Keuangan). Hasil penelitian komasri menunjukkan bahwa Variabel pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern akuntansi berpengaruh secara signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan kapasitas sumber daya manusia tidak berpengaruh secara signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, analisis data serta pembahasan diatas maka disimpulkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap keandalan laporan keuangan pada BPKD Kabupaten Luwu sehingga hipotesis diterima.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian, maka di sarankan:

1. Agar sistem akuntansi keuangan daerah dalam penyusunan laporan keuangan sebaiknya sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan agar laporan keuangan yang dihasilkan akurat dan benar.
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat dijadikan untuk mengembangkan penelitian ini dan menambahkan variabel variabel lain yang berpengaruh dengan variabel penelitian serta mengkaji tentang sistem akuntansi keuangan dan keandalan laporan keuangan .

DAFTAR RUJUKAN

- Artika, Y., Zulbahridar, Z., & Hariadi, H. 2016. *Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah, Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu (Studi pada Skpd)*. Diss. Riau University.
- Christian S, R. (2017). *Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung)* (Doctoral dissertation, Universitas Widyatama).
- Djiwandono, P. I. 2015. *Meneliti Itu Tidak Sulit*. Yogyakarta:Deepublish
- Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariete dengan Program SPSS*. Edisi 8. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul. 2016. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*, Jakarta, Salemba Empat
- Halim, Abdul. 2017. *Teori Konsep dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul dkk. 2012. *Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Keempat. Salemba Empat. Jakarta.
- Hakim, Abdul. 2017. *Kualitas Laporan Keuangan* . edisi terbaru.
- Herliana, Widya. 2016. “*Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2014)*”, Skripsi, Universitas Bakrie, Jakarta
- Hidayat, Alimul AA. 2015. *Metode Penelitian dan Teknik Analisis Data*. Jakarta: Salemba Medika.
- Komasari, Warih 2017. *Pengaruh Kapasitas Sumberdaya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Akuntansi terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada SKPD Kabupaten Bantul Bagian Akuntansi dan Keuangan)*.
- Mahmudi. (2016). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN
- Mokoginta, N., Lambey, L., & Pontoh, W. (2017). *Pengaruh Sistem Pengendalian Intern dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan*

Keuangan Pemerintah. GOING CONCERN: JURNAL RISET AKUNTANSI, 12(2).

Mulyadi. 2016. *Sistem Akuntansi*. Jakarta : Salemba Empat.

Muslikha. 2015. “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keterandalan Laporan Keuangan Daerah Pemerintahan Kota urakarta” *Jurnal Akuntansi FEB UMS*.

Pradana, A. A. P., & Setiawati, E. (2018, October). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Pengendalian Intern Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Dinas Kabupaten Boyolali). In *Seminar Nasional dan Call for Paper III Fakultas Ekonomi* (pp. 1-13).

Purba, R. B. (2018). *Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Transparansi Publik dan Aktivitas Pengendalian Terhadap Akuntabilitas Keuangan pada badan keuangan daerah kabupaten Tanah Datar*. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 8(1), 99-111.

Rafar, T. M., Fahlevi, H., & Basri, H. (2015). *Pengaruh kompetensi pengelola keuangan dan akuntabilitas terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Utara)*. *Jurnal Administrasi Akuntansi: Program Pascasarjana Unsyiah*, 4(2).

Rahmat, D. (2021). *Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Dan Sistem Pengendalian Internal, Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus: SKPD Kota DKI Jakarta)*. *SI Akuntansi*, 1-21.

Republik Indonesia, 2013. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah.

Republik Indonesia, 2011. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman pengelolaan keuangan daerah.

Republik Indonesia, 2010. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Republik Indonesia, 2003. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara .

Saryono. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta: Nuha Medika.

- Sari, A. P., Anisma, Y., & Rofika, R. (2017). *Pengaruh Sumber Daya Manusia, Komitmen Organisasi, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengawasan Keuangan Daerah dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan* (Doctoral dissertation, Riau University).
- Sari, R. P., & Suryanti, F. (2019). Determinan keandalan pelaporan keuangan pemerintah pada SKPD Kabupaten Kulon Progo. *ACCOUNTING GLOBAL JOURNAL*.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Trisnani, E. D., Dimiyati, M., & Paramu, H. (2018). Pengaruh sistem pengendalian intern terhadap keandalan laporan keuangan dengan mediasi penatausahaan aset tetap. *BISMA: Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 11(3), 271-282.
- Wardani, D. K., & Andriyani, I. (2017). *Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintahan Desa Di Kabupaten Klaten*. *Jurnal Akuntansi*, 5(2), 88–98.
- Yunita, S., Ekonomi, F., Bisnis, D. A. N., & Lampung, R. I. (2019). *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Insani Dan Penerapann Sistem Aakuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat)*.